

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Syamsul Ma'arief Iswan
Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya
syamsuliswan@stiem.co.id

✉ Corresponding Author:

Nama author : Syamsul Ma'arief Iswan

E-mail : syamsuliswan@stiem.co.id

Received : 30 Januari 2023, Revised: 5 Februari 2022, Accepted: 25 April 2023

Published : 23 Mei 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 192 orang. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *random sampling*. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 66 orang/responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode Analisis data dengan menggunakan alat statistik regresi linear sederhana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Kinerja Aparatur

Abstract: This study aims to determine and analyze the effect of Public Accountability on Apparatus Performance at the South Sulawesi Provincial Forestry Service. The population in this study were employees who worked at the South Sulawesi Provincial Forestry Service, totaling 192 people. The sampling technique to be used is random sampling, thus the number of samples in the study is 66 people/respondents. Data collection using a questionnaire. Methods Data analysis using simple linear regression statistical tools The results of the study show that public accountability has a significant positive effect on the performance of apparatus at the South Sulawesi Provincial Forestry Service.

Keywords: Public Accountability, Apparatus Performance

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya (Halim, 2007:20). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah

(*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Akuntabilitas publik adalah sebagai bentuk kebijakan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangat penting apabila dikaitkan dengan pencapaian target indikator makro pembangunan yang masih kurang memenuhi target. Untuk itu pencapaian target, pembangunan, masih perlu dioptimalisasikan dalam implementasinya.

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan non keuangan (BPKP, 2005). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik *good governance* berkenaan dengan (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*, (5) *consensus orientation*, (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; dan (8) *strategy vision* (Mardiasmo, 2009, UNDP dalam LAN, 2003). *Good governance* mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan peraturan perundangan, berupa SK. LAN Nomor 239/IX/6/82003, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah, dari hasil audit BPK masih terdapat laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum akuntabel secara wajar dan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan standar atau peraturan yang berlaku mengakibatkan kinerja aparatur masih sangat rendah (BPK RI : Hasil Pemeriksaan Keuangan 2015, melalui <http://makassar.bpk.go.id>).

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Penelitian Firdiansyah (2015), melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja namun transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian Laksana (2014), melakukan penelitian di Kabupaten Batang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

publik namun secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujana (2014), yang membuktikan akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Yanida (2013), hasil penelitian partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dan penelitian Anugerahani (2013), melakukan penelitian mengenai pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependen, variabel independen dan juga objek penelitian, dimana Firdiansyah (2015), melakukan penelitian akuntabilitas dan anggaran berbasis kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Laksana (2014) kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, pelaporan kinerja dan akuntabilitas publik di Kabupaten Batang. Sujana (2014) akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Yanida (2013) partisipasi anggaran kinerja aparatur pemerintah daerah di SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya dan Anugerahani (2013) implementasi anggaran berbasis kinerja dan kinerja pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan penelitian ini dilakukan akuntabilitas publik dan kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

II. LITERATUR REVIEW

1. Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik hanya dikenal di negara yang menerima konsep-konsep demokrasi yang menganggap rakyat sebagai faktor yang sangat penting. Asas akuntabilitas publik menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2009:20), menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan Halim (2007:20), menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2005:25), membedakan akuntabilitas publik dalam tiga dimensi, yaitu: 1) Akuntabilitas keuangan 2) Akuntabilitas manfaat 3) Akuntabilitas prosedural. Menurut Ellwod (1993) dalam Mardiasmo (2009:21), menyatakan bahwa indikator akuntabilitas publik yaitu:

Menurut Ellwod (1993) dalam Mardiasmo (2009:21), menyatakan bahwa indikator akuntabilitas publik yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran:
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
- 2) Akuntabilitas proses:
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
- 3) Akuntabilitas program:
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
 - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
- 4) Akuntabilitas kebijakan
Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

2. Konsep Kinerja Aparatur

Menurut Jalil (2009:29), menyatakan bahwa kinerja aparatur adalah suatu penentuan penetapan standar dari kinerja aktivitas aparatur yang dilakukan setiap hari berdasarkan proses masukan (*input*), proses keluaran (*output*), penanganan (*outcome*) dan keuntungan (*benefit*) dalam menghasilkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, sebagai bentuk manifestasi kinerja aparatur dalam menjalankan tugas yang optimal. Kinerja aparatur adalah terjemahan dari *performance* yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja” atau prestasi”. Kinerja aparatur menunjukkan pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas (Keban dan Yermias 2008:191-193).

Menurut Simamora (2008:231), menyatakan bahwa kinerja aparatur adalah aktivitas yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu proses untuk menghasilkan sesuatu *output*. Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja aparatur pada dasarnya adalah merupakan kemampuan untuk melakukan persyaratan-persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan maksud untuk menjaga kualitas pekerjaan.

Menurut Suyadi (2007:54), menyatakan bahwa kinerja aparatur adalah sebagai implementasi dari kegiatan perencanaan, pemrograman, pengelolaan, monitoring/pelaporan, mengevaluasi atau penilaian aktivitas sumber daya manusia. Ia menyarankan bahwa aktivitas ini harus sejalan dengan percepatan dalam pencapaian tujuan yang efisien, efektif dan produktif. Maka jelas bahwa kinerja dalam berbagai batasan memberikan cakupan bagaimana suatu kegiatan kerja harus berada dalam koridor manajemen dan administrasi keuangan yang diselaraskan dengan target-target, pencapaian yang efisien, efektif dan produktif. Ini akan mengarah pada suatu proses peningkatan kinerja berdasarkan kemampuan aparatur menyelesaikan pekerjaan, kepemimpinan yang terpadu dalam menyelesaikan pekerjaan, budaya

kerja yang diterapkan dalam penyelesaian pekerjaan dan pemberian kebijakan kompensasi atas penyelesaian pekerjaan (Setiawan, 2009:94).

Menurut Wibowo (2007:18), menyatakan bahwa kinerja aparatur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan aparatur pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur mengenai tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan, hal yang utama adalah pencapaian hasil kerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengukuran/penilaian kinerja aparatur merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Halim (2007:774), menyatakan bahwa pengukuran kinerja aparatur dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ven (1980) dalam Yanida (2013), menyatakan bahwa indikator kinerja aparatur sebagai berikut:

- 1) Tujuan (*goal*). Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai.
- 2) Standar (*standart*). Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai.
- 3) Umpan balik (*feedback*). Umpan balik merupakan masukan yang telah digunakan untuk mengukur pada kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan.
- 4) Alat atau sarana (*mean*). Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses.
- 5) Kompetensi (*competence*). Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik.
- 6) Motif (*motive*). Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu peluang.
- 7) Peluang (*opportunity*). Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan kinerja aparatur merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan aparatur pemerintah.

Sujana (2014), menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Yanida (2013), mengemukakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sedangkan

Anugerahani (2013), menemukan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, dapat dijelaskan bahwa ketika akuntabilitas publik terlaksana sesuai prosedur atau berjalan dengan baik maka kinerja aparatur akan meningkat pula.

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

III. METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dimana penelitian ini memakai metode analisis deskriptif yaitu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang dibahas. Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 192 orang/responden. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *sampling random*. Dengan demikian jumlah sampel penelitian sebanyak 66 orang/responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode Analisis data dengan menggunakan alat statistik regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2013:270).

Hasil

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan Valid. Hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh pernyataan pada variabel akuntabilitas publik (X) sebesar 0,734, dan kinerja aparatur (Y) sebesar 0,818, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. Hasil analisis statistik regresi linear sederhana untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Model Persamaan Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36,407	22,140		1,644	,139
	Akuntabilitas Publik	,637	,205	,739	3,101	,001

a. Dependent Variable: Kinerja Aparatur

Berdasarkan pada tabel 1 diperoleh t hitung sebesar 3,101. Kemudian menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan $df = n - k - 1$ (pada penelitian ini $df = 30 - 1 - 1 = 28$) untuk mendapatkan t tabel, sehingga nilai t tabel sebesar 2,04, sehingga diperoleh (t hitung $3,101 > 2,05$) dengan arah koefisien positif, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya pengaruh variabel kinerja aparatur yang dapat dijelaskan dari variabel akuntabilitas publik. Nilai koefisien sebesar 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 100% tepat (sempurna) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,739 ^a	,546	,489	3,088

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik

Berdasarkan pada tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2/R Square) sebesar 0,546. Hal ini berarti bahwa sebesar 54,6% variasi naik turunnya kinerja aparatur dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Sedangkan sisanya sebesar 45,4% ($100\% - 54,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis, dinyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,637 dan signifikan yang dilihat dari signifikansi (0,001) lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 5% (0,05). Berpengaruh secara positif artinya ketika akuntabilitas publik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan meningkat maka kinerja aparatur akan meningkat pula.

Akuntabilitas publik juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur yang ditunjukkan oleh besarnya t hitung dibanding t tabel yaitu t hitung 3,101 > 2,04). Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2009:20) bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Begitupula yang dikemukakan oleh Wibowo (2007:18) bahwa kinerja aparatur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan aparatur pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sujana (2014), dengan judul penelitian "pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial", hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian oleh Yanida (2013), dengan judul penelitian "pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah", hasil penelitian bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdiansyah (2015), dengan judul penelitian "pengaruh akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja", hasil penelitian bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja namun transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Keterbatasan. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, diharapkan penelitian selanjutnya menambah variabel lain yang mempengaruhi Kinerja aparatur. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Oleh karena itu ada baiknya pegawai yang bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi

Selatan memperhatikan dan meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan judul yang sama, sebaiknya dilengkapi dengan wawancara, dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.

REFERENSI

- Arifiyadi, Teguh. (2009). *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. Pusat Data Depkominfo.
- Anugerahani, Dian. (2013). *Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri*. Jurnal Ilmu Manajemen Revitalisasi.2 (2).
- Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (2005). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Bappenas & Depdagri. (2005). *tentang Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit Erlangga. Fakultas Ekonomi Universitas Gaja Mada.
- BPK RI : *Hasil Pemeriksaan Keuangan 2015*. melalui <http://makassar.bpk.go.id>. Diakses Tanggal 19 Pebruari 2016.
- Firdiansyah, Muhammad. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.11 (2) 611-628.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gaja Mada.
- Ibrahim, Amin. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implikasinya*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Jalil, A. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*, Terjemahan oleh G.A. Ticoalu. Jakarta : Bumi Aksara.
- Keban dan Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Bandung : Penerbit Gava Media.
- Laksana, Agung Puja. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang*. Accounting Analysis Jurnal.3 (2).
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Badung : Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nisfiannoor, Muhammad. (2009). *Pendekatan Statistik Modern Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 .*tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)*. Jakarta : Aksara Persada.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Sadjiarto, Arja. (2010). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. 2 (2) 138 -150.
- Setiawan. H.P. (2009). *Manajemen Strategi Lembaga*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- SK. LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. *tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Silaen, Sakti. (2010). *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Simamora. H. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Cetakan Keenambelas Alfabeta.
- Sujana, Edy. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng*. Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha.2 (1).
- Suyadi, P. (2007), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan*.Yogyakarta : Edisi I1, BPFE.
- Umar, Husain. (2008). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Surakhmad. (2008). *Metode dan Teknik Akuntabilitas*. Bandung : Tarsito.
- Yanida, Maria. (2013). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.4 (3).